

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP SAKSI YANG  
MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI BAWAH SUMPAH PADA  
PERSIDANGAN (STUDI KASUS NOMOR 58/PID.B/2022/PN. TPG.)**

Oleh  
Sofia Herlina  
NIM. 190574201065

**ABSTRAK**

Keterangan saksi adalah peranan penting dalam mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana. Penerapan sanksi pidana berbohong di dalam ruang sidang diancam dengan Pasal 242 ayat (1) KUHP dengan hukuman tujuh tahun bagi siapapun dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik lisan maupun tertulis, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang ditunjuk untuk itu. Oleh ayat (4) pasal yang sama, hakim diberi wewenang untuk menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak yang diatur dalam Pasal 35 KUHP. Ada atau tidak akibat hukum, bohong di persidangan tetap bisa dikriminalisasi. Jika berakibat merugikan pada terdakwa, hukumannya malah diperberat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap sumpah palsu yang dilakukan berdasarkan putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN. Tpg dan bagaimana kekuatan hukum sumpah dan keterangan palsu dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 58/Pid.B/2022/PN. Tpg. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan seseorang telah disumpah atau mengucapkan janji sebagai saksi tetapi kesaksian atau keterangan yang diberikannya sebagai saksi disangka palsu, maka Hakim berwenang memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Dan untuk wewenang Hakim ini terdapat pada ketentuan Pasal 174 KUHP, Penerapan sanksi pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Untuk memperoleh kebenaran dari keterangan saksi, selain dilakukan pengambilan sumpah, hakim juga dituntut untuk bertindak lebih tegas agar setiap orang yang memberikan keterangan di pengadilan.

Kata Kunci : Keterangan Saksi, Penerapan Sanksi, Sumpah Palsu

**IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST WITNESS  
THAT PROVIDE FALSE STATEMENTS UNDER OATH AT TRIALS(CASE  
STUDY NUMBER 58/PID.B/2022/PN. TPG)**

By  
Sofia Herlina  
NIM. 190574201065

**ABSTRACT**

*Witness testimony is an important role in uncovering the material truth of a crime. The application of criminal sanctions for lying in the courtroom is punishable by Article 242 paragraph (1) of the Criminal Code with a penalty of seven years for anyone who deliberately gives false statements under oath, both orally and in writing, personally or by their attorney appointed for that purpose. By paragraph (4) of the same article, judges are authorized to apply additional punishment in the form of revocation of rights as stipulated in Article 35 of the Criminal Code. Whether there are legal consequences or not, lying in court can still be criminalized. If the result is detrimental to the defendant, the sentence is even more severe. The formulation of the problem in this study is how to apply criminal sanctions for perjury based on decision Number 58/Pid.B/2022/PN. Tpg and what are the legal powers of oaths and false statements in the process of examining cases at the Tanjungpinang District Court Number 58/Pid.B/2022/PN. but The research method used in this study is a normative method of collecting data using literature studies and interviews. Analyzed so as to produce a conclusion that a person has been sworn in or made a promise as a witness but the testimony or information he has given as a witness is presumed to be false, the judge has the authority to issue an order for the witness to be detained to be further prosecuted in a case charged with perjury. And for this Judge's authority is found in the provisions of Article 174 of the Criminal Procedure Code. The application of criminal sanctions is an application of punishment handed down to perpetrators of criminal acts who commit acts against the law, where these actions can harm themselves or others and have been regulated in a certain law. In order to obtain the truth from the testimony of witnesses, in addition to taking an oath, judges are also required to act more decisively so that everyone who gives testimony in court.*

*Key Word: Witness Statements, Application of Sanctions, False Oaths*